



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2022 | Hal.: 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Wawako: Tak Bebankan APBD

■ Penyertaan Modal ke PDAM

PONTIANAK, TRIBUN
 Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda). Keempat raperda itu adalah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perubahan kelima atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang retribusi jasa umum dan perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
 "Jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-



Pembiayaannya dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui APBD. Selanjutnya setelah proses administrasinya selesai maka Pemerintah Pusat akan menyertakan kembali dana

Bahasan
 Wakil Wali Kota

fraksi diupayakan dapat merespon pertanyaan, saran dan pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," kata Bahasan dihadapan peserta rapat paripurna ke sepuluh masa persidangan I tahun 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna

DPRD Kota Pontianak, Jumat (2/12).

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa terkait penjelasan dan penjabaran tentang penyertaan modal yang berdampak pada peran Perumda Air Minum

■ Bersambung ke hal. 10



Wawako: Tak Bebankan APBD

Sambungan Hal.9

Tirta Khatulistiwa. Di mana setiap tahunnya meningkat jumlah dana dalam penyer-taan modal, Bahasan men-jelaskan bahwa mening-katnya jumlah pembiayaan dalam penyer-taan modal tersebut tidak membeban-kan APBD Kota Pontianak secara langsung.

Namun dalam mekanisme pembiayaan untuk program penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasil-

an Rendah (MBR) ini melaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR).

"Pembiayaannya dibiayai terlebih dahulu oleh Pe-merintah Kota Pontianak melalui APBD. Selanjutnya setelah proses administ-ra-sinya selesai maka Peme-rintah Pusat akan menyer-takan kembali dana yang digunakan melalui APBN ke APBD yang kemudian

disertakan dalam penyer-taan modal kepada PDAM," jelasnya.

Kemudian, pihaknya juga akan segera melau-kan pembahasan lebih lanjut serta menetapkan keempat Raperda yang di-usulkan tersebut sebagai-mana pendapat dan saran yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Gerakan Indonesia Raya,

Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai PPP, Frak-si Partai Hati Nurani Gol-kar Bintang Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Kea-dilan Bangsa.

"Kami sangat berter-i-ma kasih kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi positif terhadap empat Raperda yang kami usul-kan," tukas Wawako Ba-hasan. (ufi)